



## Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi

### Laporan Kinerja Triwulan I Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah XVI Gorontalo Tahun 2025

Berikut ini kami sampaikan hasil capaian kinerja pada Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah XVI Gorontalo selama Triwulan I tahun 2025.

#### A. Progress Capaian Kinerja

Sasaran/Indikator	Target PK	Satuan	TW I	
			Target	Realisasi
<b>[S 1] Meningkatnya kualitas layanan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI)</b>				
[IKU 1.1] Kepuasan pengguna terhadap layanan utama LLDIKTI	99.8	%	0	0
[IKU 1.2] Persentase PTS yang terakreditasi atau meningkatkan mutu dengan cara penggabungan dengan PTS lain	78	%	0	0
<b>[S 2] Meningkatnya efektivitas sosialisasi kebijakan pendidikan tinggi</b>				
[IKU 2.1] Persentase PTS yang menyelenggarakan kegiatan pembelajaran di luar program studi	61.9	%	0	0
[IKU 2.2] Persentase mahasiswa S1 atau D4/D3/D2/D1 PTS yang menjalankan kegiatan pembelajaran di luar program studi atau meraih prestasi	2.63	%	0	0
[IKU 2.3] Persentase PTS yang mengimplementasikan kebijakan antiintoleransi, antikekerasan seksual, antiperundungan, antinarkoba, dan antikorupsi	95.2	%	0	0
<b>[S 3] Meningkatnya inovasi perguruan tinggi dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan</b>				
[IKU 3.1] Persentase PTS yang berhasil meningkatkan kinerja dengan meningkatkan jumlah dosen yang berkegiatan di luar kampus	25	%	0	0
[IKU 3.2] Persentase PTS yang berhasil meningkatkan kinerja dengan meningkatkan jumlah program studi yang bekerja sama dengan mitra	57.14	%	0	0
<b>[S 4] Meningkatnya tata kelola Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI)</b>				
[IKU 4.1] Predikat SAKIP	BB	Predikat	-	-
[IKU 4.2] Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L	91	Nilai	0	0



Catatan :

- UU ITE No 1 Tahun 2024 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR



Balai Besar  
Sertifikasi  
Elektronik

## **B. Analisis Hasil Capaian Kinerja**

### **[S 1] Meningkatnya kualitas layanan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI)**

#### **[IKU 1.1] Kepuasan pengguna terhadap layanan utama LLDIKTI**

##### **Progress/Kegiatan**

Sebagai lembaga yang menjadikan pelayanan sebagai tugas utama, LLDIKTI Wilayah XVI terus mengupayakan peningkatan kualitas. Diantaranya adalah :

1. Tindak lanjut survey kepuasan Masyarakat atas pelayanan yang diberikan.
2. Pengembangan aplikasi dasbor LLDIKTI wilayah XVI sebagai terobosan dalam visualisasi dan pengelolaan data pendidikan tinggi untuk wilayah Sulawesi Utara, Gorontalo dan Sulawesi Tengah.
3. peningkatan layanan helpdesk dengan fitur pelacakan ajuan atau tracking yang dapat memantau status layanan SIPINTER secara real-time.

##### **Kendala/Permasalahan**

Kendala yang dihadapi dalam peningkatan kepuasan pengguna terhadap layanan utama LLDIKTI Wilayah XVI adalah kurangnya SDM yang berkompeten dalam pengembangan Sistem Pelayanan Berbasis Elektronik (SPBE), serta kurangnya anggaran untuk ketersediaan infrastruktur server yang dikarenakan regulasi yang melarang pengadaan server mandiri di satuan kerja. Selain itu, penggunaan server Kominfo juga memiliki banyak keterbatasan dari segi birokrasi sehingga membutuhkan lebih lama untuk menyelesaikan satu aplikasi.

##### **Strategi/Tindak Lanjut**

Menambah SDM yang berkompeten dibidang SPBE, serta melakukan tindak lanjut terhadap hasil evaluasi standar pelayanan. Selain itu parameter penilaian untuk Tingkat kepuasan pengguna akan dibuat lebih terperinci.

### **[S 1] Meningkatnya kualitas layanan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI)**

#### **[IKU 1.2] Persentase PTS yang terakreditasi atau meningkatkan mutu dengan cara penggabungan dengan PTS lain**

##### **Progress/Kegiatan**

Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kinerja perguruan tinggi yang mempengaruhi proses akreditasi serta melakukan pemantauan dan pendataan pada Perguruan Tinggi yang sudah habis atau mendekati masa kadaluwarsa akreditasi baik perguruan tinggi maupun program studi.

Dalam hal peningkatan mutu dengan cara penggabungan dengan PTS lain, LLDIKTI Wilayah XVI terus memantau progress penyelesaian penyatuan Universitas Pembangunan Indonesia Manado dengan Sekolah Tinggi Ilmu Kesejahteraan sosial Manado.

##### **Kendala/Permasalahan**

Proses Akreditasi perguruan tinggi yang cukup lama salah satunya dikarenakan oleh migrasi Akun Sapto dari 1.0 menjadi Sapto 2.0 yang kurang tersosialisasi ke PTS. Selain itu kendala lain adalah terbatasnya komunikasi antara perguruan tinggi pengusul dengan BAN- PT atau LAM.

Sedangkan untuk penyatuan Universitas Pembangunan Indonesia Manado dengan Sekolah Tinggi Ilmu Kesejahteraan Sosial Manado masih terkendala pada aspek hukum.



**Catatan :**

- UU ITE No 1 Tahun 2024 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE



## **Strategi/Tindak Lanjut**

Melaksanakan kegiatan workshop strategi peningkatan peringkat akreditasi bagi Perguruan Tinggi Swasta di Lingkungan LLDIKTI Wilayah XVI. dan terus melakukan pemantauan terkait status akreditasi PT.

### **[S 2] Meningkatnya efektivitas sosialisasi kebijakan pendidikan tinggi**

#### **[IKU 2.1] Persentase PTS yang menyelenggarakan kegiatan pembelajaran di luar program studi**

### **Progress/Kegiatan**

Pada periode Triwulan I ini, LLDIKTI XVI berfokus pada pemantauan laporan pelaksanaan IKU PTS, sebagai alat ukur pelaksanaan tahun sebelumnya. Selain laporan pelaksanaan IKU PTS, LLDIKTI Wilayah XVI juga melaksanakan beberapa kegiatan yang dapat menunjang kegiatan pembelajaran diluar program studi diantaranya Workshop Optimalisasi Penggunaan Teknologi Pembelajaran Daring.

### **Kendala/Permasalahan**

Adanya pemisahan Kementerian yang semula Kemendikburistek menjadi Kemendiktisaintek, menjadikan beberapa program masih belum bisa dilakukan dan menunggu rencana strategis serta program-program yang akan menjadi unggulan dalam pelaksanaan transformasi pendidikan tinggi.

Untuk pelaksanaan workshop optimalisasi penggunaan teknologi pembelajaran daring (LMS) terdapat kendala diantaranya : keterbatasan kompetensi dan literasi digital para dosen, keterbatasan sarana dan prasarana, serta kurangnya dukungan institusi dan Yayasan.

## **Strategi/Tindak Lanjut**

Mengintensifkan monitoring pelaporan IKU PTS. Serta mempersiapkan program-program yang mendukung kebijakan terbaru dari Kemendiktisaintek.

### **[S 2] Meningkatnya efektivitas sosialisasi kebijakan pendidikan tinggi**

#### **[IKU 2.2] Persentase mahasiswa S1 atau D4/D3/D2/D1 PTS yang menjalankan kegiatan pembelajaran di luar program studi atau meraih prestasi**

### **Progress/Kegiatan**

Pada periode Triwulan I ini, LLDIKTI XVI berfokus pada pemantauan laporan pelaksanaan IKU PTS, sebagai alat ukur pelaksanaan tahun sebelumnya. Selain laporan pelaksanaan IKU PTS, LLDIKTI Wilayah XVI juga melaksanakan beberapa kegiatan yang dapat menunjang kegiatan pembelajaran diluar program studi diantaranya Workshop Optimalisasi Penggunaan Teknologi Pembelajaran Daring.

### **Kendala/Permasalahan**

Adanya pemisahan Kementerian yang semula Kemendikburistek menjadi Kemendiktisaintek, menjadikan beberapa program masih belum bisa dilakukan dan menunggu rencana strategis serta program-program yang akan menjadi unggulan dalam pelaksanaan transformasi pendidikan tinggi.

## **Strategi/Tindak Lanjut**



#### **Catatan :**

- UU ITE No 1 Tahun 2024 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE



Mengintegrasikan monitoring pelaporan IKU PTS. Serta mempersiapkan program-program yang mendukung kebijakan terbaru dari Kemendikisaintek.

## **[S 2] Meningkatnya efektivitas sosialisasi kebijakan pendidikan tinggi**

### **[IKU 2.3] Persentase PTS yang mengimplementasikan kebijakan antiintoleransi, antikekerasan seksual, antiperundungan, antinarkoba, dan antikorupsi**

#### **Progress/Kegiatan**

Adanya perubahan dari PPKS menjadi PPKPT dengan hadirnya Permendikbudristek Nomor 55 tahun 2024 yang menggantikan Permendikburistek nomor 30 tahun 2021 yang memiliki cakupan lebih luas dibandingkan PPKS yang fokus hanya pada kekerasan seksual. Untuk itu LLDIKTI Wilayah XVI terus mengimbau PTS untuk melakukan pembaruan Satuan Tugas (Satgas) agar pengawasan akan lebih efektif.

#### **Kendala/Permasalahan**

Saat ini LLDIKTI XVI belum mendapatkan pelaporan terkait jumlah PTS yang sudah membuat regulasi PT tentang pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkup perguruan tinggi.

#### **Strategi/Tindak Lanjut**

Mendorong PTS untuk melaporkan regulasi PPKPT yang sudah disahkan di PTSnya masing-masing.

## **[S 3] Meningkatnya inovasi perguruan tinggi dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan**

### **[IKU 3.1] Persentase PTS yang berhasil meningkatkan kinerja dengan meningkatkan jumlah dosen yang berkegiatan di luar kampus**

#### **Progress/Kegiatan**

Untuk peningkatan persentase jumlah dosen yang berkegiatan diluar kampus, LLDIKTI XVI terus mendorong dosen untuk selalu melakukan pemutakhiran data dosen pada SISTER dan PDDIKTI. Kompetensi dosen dalam Peningkatan kinerja melalui kegiatan di luar kampus juga didukung dengan beberapa kegiatan yang dilakukan diantaranya , Sosialisasi Perencanaan kebutuhan dan penyusunan formasi Jabatan Fungsional Dosen dengan tujuan untuk memberikan pemahaman tentang pentingnya perencanaan kebutuhan dosen dalam mendukung proses akademik dan pengembangan institusi pendidikan tinggi.

#### **Kendala/Permasalahan**

Pelaporan kegiatan dosen yang berkegiatan diluar kampus hanya dilaporkan melalui SISTER, sehingga membutuhkan waktu yang cukup lama dalam mengumpulkan pelaporan data dosen.

Sedangkan untuk kegiatan sosialisasi perencanaan kebutuhan dan penyusunan formasi jabatan fungsional dosen, adalah kurangnya pemahaman dosen mengenai proses pengajuan jabatan fungsional sesuai dengan peraturan terbaru yaitu Permendikisaintek Nomor 65 Tahun 2025.

#### **Strategi/Tindak Lanjut**

Mengajak Pimpinan PTS untuk berperan aktif memastikan pemutakhiran data dosen dapat terlaksana secara



Catatan :

- UU ITE No 1 Tahun 2024 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE



**Balai Besar  
Sertifikasi  
Elektronik**

berkala.

**[S 3] Meningkatnya inovasi perguruan tinggi dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan**  
**[IKU 3.2] Persentase PTS yang berhasil meningkatkan kinerja dengan meningkatkan jumlah program studi yang bekerja sama dengan mitra**

**Progress/Kegiatan**

Di Triwulan I ini, LLDIKTI Wilayah XVI melaksanakan monitoring terhadap pelaporan Kerjasama PTS dengan mitra melalui aplikasi LAPORKERMA. LLDIKTI Wilayah XVI juga melakukan pendampingan secara berkelanjutan kepada operator LAPORKERMA

**Kendala/Permasalahan**

Dalam proses pelaporan Kerjasama, masih terdapat PTS yang belum melaporkannya melalui aplikasi LAPORKERMA. Lemahnya akses menjalin Kerjasama baik dengan Perguruan Tinggi Unggul dan DUDI juga menjadi salah satu kendala PTS.

**Strategi/Tindak Lanjut**

Untuk strategi kedepan, LLDIKTI XVI akan melaksanakan bimbingan teknis Peningkatan pelaporan Kerjasama PT pada Laporkerma, serta penguatan kerja sama dengan Perguruan Tinggi baik dalam Negeri maupun Luar Negeri.

**[S 4] Meningkatnya tata kelola Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI)**  
**[IKU 4.1] Predikat SAKIP**

**Progress/Kegiatan**

Beberapa upaya yang telah dilakukan untuk meningkatkan nilai SAKIP yakni pengumpulan pelaporan pajak SPT Tahunan, penyusunan SKP 2024 dan rencana SKP 2025 ASN LLDIKTI, serta melaksanakan FGD terkait program prioritas tahun 2026

**Kendala/Permasalahan**

Kendala yang dihadapi adalah dalam perencanaan kinerja masih terkendala dengan belum terbitnya Renstra Kemdiktisaintek sehingga LLDIKTI XVI juga belum dapat menyusun Renstra yang akan digunakan sebagai acuan dalam perencanaan kinerja serta penyusunan Perjanjian Kinerja tahun 2025

**Strategi/Tindak Lanjut**

Memaksimalkan perencanaan kinerja tahun 2025 dengan mengacu pada Kepmendikbud No. 210 sebagai dasar perencanaan kinerja

**[S 4] Meningkatnya tata kelola Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI)**  
**[IKU 4.2] Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L**

**Progress/Kegiatan**



Catatan :

- UU ITE No 1 Tahun 2024 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE

Pada tahun 2025, pasca diberlakukan efisiensi, maka beberapa hal yang telah dilakukan yakni :

1. Melakukan revisi dan penyesuaian anggaran kegiatan
2. Menyusun strategi pencapaian output
3. Melakukan penyesuaian RAB, RPD dan penjadwalan ulang kegiatan
4. Menyiapkan dokumen pendukung untuk percepatan pelaksanaan anggaran

### Kendala/Permasalahan

Kendala yang dihadapi pasca efisiensi yakni penyerapan anggaran tidak maksimal karena terdapat beberapa kegiatan yang di tunda pelaksanaannya ke triwulan II dan III, hal ini menyebabkan target realisasi anggaran yang sudah di petakan pada RPD tidak tercapai.

### Strategi/Tindak Lanjut

Memaksimalkan penyerapan anggaran pada triwulan II serta mengubah strategi pelaksanaan kegiatan dari luring ke daring,

### C. Realisasi Fisik dan Anggaran per-Rincian Output

No	Rincian Output	Satuan	Fisik		Anggaran		
			Target	Realisasi	Alokasi	Realisasi	%
1	[DK.7733.BDB.001] Lembaga Pendidikan Tinggi Akademik dan Vokasi yang mendapatkan layanan pembinaan peningkatan mutu	Lembaga	18	69	Rp4.515.149.000	Rp1.453.378.085	32.19
2	[DK.7733.BDB.002] Lembaga Pendidikan Tinggi Akademik dan Vokasi yang mendapat layanan rekomendasi	Lembaga	5	17	Rp43.650.000	Rp16.172.880	37.05
3	[DK.7733.BEJ.001] Dosen Non PNS yang Menerima Tunjangan Profesi	Orang	1540	1541	Rp54.226.064.000	Rp39.045.600.900	72.01
4	[WA.7735.EBA.956] Layanan BMN	Layanan	0	2	Rp9.133.000	Rp6.095.000	66.74
5	[WA.7735.EBA.962] Layanan Umum	Layanan	0	0	Rp559.434.000	Rp279.556.913	49.97
6	[WA.7735.EBA.994] Layanan Perkantoran	Layanan	0	0	Rp23.131.210.000	Rp19.090.958.779	82.53
<b>Total Anggaran</b>					<b>Rp82.484.640.000</b>	<b>Rp59.891.762.557</b>	<b>72.61</b>



Catatan :

- UU ITE No 1 Tahun 2024 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE




**Balai Besar  
Sertifikasi  
Elektronik**

#### D. Rekomendasi Pimpinan

1. **Percepat implementasi sistem pemantauan kinerja layanan**, terutama yang terkait dengan SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik).
2. **Optimalkan pembagian tugas dan tanggung jawab** antarunit pelayanan agar tidak terjadi tumpang tindih dan keterlambatan respon kepada pemangku kepentingan.
3. **Segera laksanakan survei kepuasan pengguna versi awal (baseline)** untuk memperoleh gambaran awal persepsi layanan dan sebagai pembanding triwulan berikutnya.
4. **Dorong partisipasi aktif seluruh pegawai** dalam budaya pelayanan prima melalui sosialisasi nilai-nilai pelayanan publik dan orientasi pengguna (*customer-centric mindset*).

Gorontalo , 7 November 2025

	Ditandatangani secara elektronik oleh Kepala LLDIKTI Wil. XVI Munawir Sadzali Razak
-----------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------



Catatan :

- UU ITE No 1 Tahun 2024 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE